

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	REPUBLIKA	3	1-8-'02

Pemda Dapat 30 Persen Saham

Divestasi KPC Rampung

DPR menginginkan pemerintah membentuk sebuah konsorsium yang menguasai 51 persen saham tersebut.

JAKARTA — Rampung sudah divestasi 51 persen PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang sempat berlarut-larut. Kemarin, KPC telah menawarkan 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan harga 419 juta dolar AS. Namun begitu, KPC tetap menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang batu bara terbesar di tanah air itu.

"Setelah melalui pembicaraan panjang, pada akhirnya KPC mau menawarkan 51 persen sahamnya

kepada pemerintah Indonesia," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgianto di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, kata Purnomo, Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Megawati memutuskan bahwa alokasi 51 persen saham KPC didistribusikan sebesar 31 persen untuk Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan sisanya yang 20 persen, jelas dia, untuk pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, sambung Purnomo,

akan melakukan *due diligence* kepada calon investor baik yang berhubungan dengan Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. Terutama mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membeli saham KPC.

Sebelumnya, divestasi KPC terancam gagal menyusul belum dicabutnya gugatan dan sita jaminan oleh Pemprov Kaltim terhadap KPC. "Pemprov Kaltim baru mencabut sita jaminannya pada tanggal 22 Juli 2002, sedangkan gugatan pokoknya baru dicabut pada 29 Juli 2002," kata Purnomo.

Sekjen ESDM Djoko Darmono sempat menyatakan bahwa divestasi tersebut akan tertunda. Pasalnya, kata Djoko, hingga tenggat waktu 31 Juli 2002 Pengadilan Negeri Jaksel belum memutuskan pencabutan gugatan itu.

Sementara itu, Komisi VIII DPR menyatakan pemerintah harus membentuk sebuah wadah konsorsium di bawah penguasaan nasional yang menguasai 51 persen saham KPC. Saham divestasi tersebut, menurut Komisi VIII, tidak bisa dipisah-pisah antara milik peme-

rintah pusat dengan daerah.

"Jadi harus ada kesatuan konsorsium dengan kepemilikan 51 persen saham," kata Ketua Komisi VIII Irwan Prayitno kepada *Republika* di Jakarta, kemarin. Distribusi yang ditawarkan pemerintah, kata Irwan, membuat KPC tetap sebagai pemegang saham mayoritas dengan 49 persen.

Itu berarti, jelas anggota Dewan dari Partai Keadilan itu, segala kebijakan dan keputusan mengenai perusahaan tetap didominasi KPC. Jadi, menurut dia, pemerintah harus tegas dengan memberikan 51 persen saham itu kepada satu konsorsium pemerintah saja dengan tetap mengutamakan aspirasi masyarakat Kaltim.

Selain demi kepentingan nasional, penguasaan dalam satu wadah, menurut Irwan, juga sesuai dengan semangat kontrak. Juga, katanya, untuk menghindari tuding kalau dalam memutuskan ini pemerintah didikte asing — dalam hal ini KPC.

Husnie Thamrin, anggota Komisi VIII lainnya, mengaku kecewa dengan pendistribusian 51 persen saham milik pemerintah. Seharusnya, kata Husnie, 51 persen saham dikuasai oleh sebuah wadah konsorsium bersama. "Bukan dengan dibagi-bagi begitu," tandas anggota Dewan dari Fraksi Golkar itu.

Dengan pendistribusian seperti itu, jelas Husnie, KPC tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan total 49 persen. "Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa pemerintah harus membentuk satu konsorsium dengan kepemilikan mayoritas."

Sebaliknya, lanjut anggota Dewan dari Kalimantan itu, kalau KPC masih menjadi pemegang saham mayoritas, maka banyak hal yang akan dikendalikan oleh dia. Dari manajemen, tegasnya, sampai menyangkut kebijakan-kebijakan strategis perusahaan. ■ erd